Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Volume. 3 Nomor. 1 Februari 2026
E-ISSN : 3063-2803; P-ISSN : 3063-279X, Hal. 154-159
DOI: https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i1.1562
Tersedia: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi

Kenaikkan Harga BBM dan Dampaknya Terhadap Kepentingan Publik

M.Fhedry Chandriyadi[1*], Nuzli Rhamadhani[2]
[1-2] Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang
**Penulis Korespondensi: chandriyadiandre@gmail.com* [1]

Abstrack: *The policy of increasing fuel prices is a strategic public policy that has broad implications for the lives of people in Indonesia. Fuel plays an important role in supporting economic activity, distribution of goods, and social mobility. This article aims to analyze the impact of the fuel price increase policy on public interests by emphasizing the current context in Indonesia and the empirical realities that arise in society. This study uses a qualitative approach through literature review and policy analysis. The results of the study show that the increase in fuel prices has a direct impact on the increase in the cost of living, a decline in people's purchasing power, and the emergence of social pressure, especially among low-income groups. Although the government views this policy as a rational step to maintain fiscal stability and the sustainability of energy subsidies, compensation and social protection policies remain key factors in ensuring that the public interest and the goal of community welfare are maintained.*

Keywords*: Fuel Prices; Indonesia; Public Interest; Public Policy; Social Mobility.*

Abstrak: Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebijakan publik strategis yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. BBM berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan mobilitas sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan kenaikan harga BBM terhadap kepentingan publik dengan menekankan konteks Indonesia terkini dan realitas empiris yang muncul di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya hidup, menurunnya daya beli masyarakat, serta munculnya tekanan sosial, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun kebijakan tersebut dipandang pemerintah sebagai langkah rasional untuk menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan subsidi energi, kebijakan kompensasi dan perlindungan sosial tetap menjadi faktor kunci agar kepentingan publik dan tujuan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.

Kata kunci: Harga Bahan Bakar; Indonesia; Kebijakan Publik; Kepentingan Publik; Mobilitas Sosial.

1. PENDAHULUAN

Bahan bakar minyak (BBM) memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di Indonesia, dengan dampak langsung pada mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta sektor ekonomi lainnya. Kenaikan harga BBM, seperti yang terjadi pada tahun 2022, memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui inflasi yang dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi dan distribusi, maupun dalam hal perubahan dalam anggaran negara akibat pengurangan subsidi BBM (Akhmad et al., 2023). Penelitian oleh Tamba et al. (2025) menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM secara langsung mempengaruhi inflasi dan ketimpangan pengeluaran masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi daya beli. Lebih lanjut, Nurfalah (2024) menemukan bahwa volatilitas harga minyak, yang dipengaruhi oleh faktor internasional, juga berperan dalam menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi investasi dan stabilitas ekonomi makro. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan harga

Naskah Masuk: 16 Desember 2025; Revisi: 24 Januari 2026; Diterima: 26 Februari 2026; Terbit: 28 Februari 2026

BBM memiliki efek yang luas, baik terhadap kesejahteraan masyarakat maupun terhadap dinamika perekonomian secara keseluruhan. Sehingga, pengelolaan harga BBM yang bijaksana sangat penting untuk memastikan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Lestari & Asyiqin, 2022).

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan penyesuaian harga BBM kerap diambil sebagai respons terhadap berbagai tekanan, seperti fluktuasi harga minyak dunia, meningkatnya beban subsidi energi, serta kebutuhan menjaga keseimbangan fiskal negara. Menurut Pratiwi (2022),Pemerintah memandang bahwa subsidi BBM yang terlalu besar berpotensi membebani anggaran negara dan mengurangi ruang fiskal untuk pembiayaan sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Atas dasar tersebut, kebijakan kenaikan harga BBM sering diposisikan sebagai langkah rasional dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan.

Namun demikian, kebijakan kenaikan harga BBM tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang masih ditandai oleh tingginya ketergantungan terhadap energi berbasis BBM. Bagi sebagian besar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan menengah, BBM memiliki kontribusi besar dalam struktur pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan transportasi dan distribusi barang. Akibatnya, setiap kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai berupa meningkatnya biaya hidup, menurunnya daya beli, serta bertambahnya tekanan ekonomi pada kelompok masyarakat rentan.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan kenaikan harga BBM telah mencerminkan kepentingan publik. Kepentingan publik menuntut agar setiap kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketika kebijakan dinilai lebih menekankan pada kepentingan fiskal negara tanpa diimbangi dengan perlindungan sosial yang memadai, maka risiko ketidakpuasan publik dan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam konteks Indonesia terkini, kebijakan kenaikan harga BBM juga menunjukkan adanya dinamika antara tujuan negara dan respons masyarakat. Berbagai bentuk reaksi publik, mulai dari keluhan di ruang publik hingga kritik sosial, mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya analisis kebijakan BBM yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan kenaikan harga BBM terhadap kepentingan publik di Indonesia. Analisis ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip kepentingan publik serta untuk memberikan gambaran mengenai perlunya keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki dampak luas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya biaya produksi dan transportasi yang kemudian memicu inflasi serta menurunkan daya beli masyarakat (Sarbaini & Nazaruddin, 2022; Soesanto et al., 2024). Selain itu, kenaikan harga BBM juga dapat memengaruhi pola konsumsi rumah tangga dan keputusan belanja masyarakat karena meningkatnya harga barang dan jasa (Taufik et al., 2023). Dampak tersebut juga dirasakan oleh sektor usaha kecil dan menengah yang mengalami peningkatan biaya operasional dan penurunan penjualan akibat melemahnya daya beli masyarakat (Putri et al., 2025). Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah cenderung mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar karena kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan pokok (Nabila, 2023). Dengan demikian, kebijakan kenaikan harga BBM perlu dianalisis secara komprehensif agar dapat mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas fiskal negara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya produksi, memicu inflasi, dan menurunkan konsumsi rumah tangga sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kenaikan harga energi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, perilaku konsumsi, serta keberlanjutan usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada biaya transportasi dan distribusi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku teks kebijakan publik, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta dokumen kebijakan terkait subsidi dan harga BBM di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah substansi kebijakan serta dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan kenaikan harga BBM dan kepentingan publik dalam konteks nasional.

3. PEMBAHASAN

Dalam perspektif kebijakan publik, kenaikan harga BBM di Indonesia merupakan bagian dari upaya reformasi subsidi energi. Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap subsidi BBM yang dinilai membebani anggaran negara dan kurang tepat sasaran. Penyesuaian harga BBM dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan menjaga keberlanjutan anggaran negara.

Namun, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang masih didominasi oleh kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transportasi berbasis BBM menjadikan kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga dan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Secara empiris, dampak kenaikan harga BBM dapat diamati secara nyata di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu dampak paling langsung terlihat pada sektor transportasi, di mana penyesuaian harga BBM sering diikuti dengan kenaikan tarif angkutan umum dan biaya logistik. Kondisi ini meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga BBM berdampak signifikan terhadap daya beli. Rumah tangga harus melakukan penyesuaian pola konsumsi, seperti mengurangi pengeluaran non-primer atau menurunkan kualitas konsumsi kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain dampak ekonomi, kebijakan kenaikan harga BBM juga memunculkan dampak sosial. Meningkatnya keluhan publik, kritik di ruang publik, serta aksi protes di berbagai daerah mencerminkan adanya persepsi bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik. Respons sosial ini menunjukkan bahwa kebijakan BBM tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengurangi dampak negatif kebijakan kenaikan harga BBM, pemerintah Indonesia umumnya menyertakan program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan subsidi yang lebih terarah. Program-program ini bertujuan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan agar tidak terdampak secara berlebihan oleh kebijakan tersebut. Namun, efektivitas kebijakan kompensasi sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas implementasinya. Dalam praktiknya, masih ditemukan tantangan seperti keterbatasan jangkauan program dan ketidaktepatan penerima manfaat. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan

harga BBM perlu dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.

4. KESIMPULAN

Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebijakan publik strategis yang memiliki implikasi luas terhadap kepentingan publik di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek fiskal negara, tetapi juga secara langsung memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kenaikan harga BBM berkontribusi terhadap meningkatnya biaya hidup, menurunnya daya beli, serta bertambahnya tekanan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi berbasis BBM.

Di sisi lain, kebijakan kenaikan harga BBM sering dipahami sebagai langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan menjamin keberlanjutan subsidi energi dalam jangka panjang. Dari perspektif pengelolaan keuangan negara, kebijakan ini memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat. Namun demikian, kebijakan publik tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek efisiensi fiskal, melainkan juga harus mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi kepentingan publik dan mewujudkan keadilan sosial.

Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kenaikan harga BBM sangat bergantung pada keberadaan dan kualitas kebijakan pendukung, terutama program perlindungan sosial dan strategi komunikasi kebijakan. Program kompensasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan berperan penting dalam mengurangi dampak negatif kebijakan terhadap kelompok masyarakat rentan. Selain itu, komunikasi kebijakan yang transparan dan partisipatif diperlukan agar masyarakat dapat memahami tujuan dan arah kebijakan, sehingga potensi resistensi sosial dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, W. T., & Solekhan, M. (2024). Kebijakan publik Indonesia: Studi pada kebijakan pemerintah tentang pembatasan BBM subsidi tahun 2024. *Journal Innovation in Education*, *2*(4), 70–86. https://doi.org/10.59841/inoved.v2i4.1874

Akhmad, A., Asse, A., Nursalam, N., Ibrahim, I., Bunyamin, B., Ansaar, A., & Sahajuddin, S. (2023). The impact of the increase of oil fuel price and government subsidy on Indonesia's economic performance. *International Journal of Energy Economics and Policy, 13*(6), 547–557. https://doi.org/10.32479/ijeep.15033

Al Izzati, R., Yusrina, A., & Suryahadi, A. (2023). *Estimating the effect of a fuel price increase on poverty and inequality: Evidence from a fuel subsidy reduction in Indonesia* (Research Note No. 1). The SMERU Research Institute.

Lestari, F. D., & Asyiqin, H. (2022). Pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap tingkat inflasi di Indonesia. *Journal of Islamic Business Management Studies, 1*(2), 95–108.

Linda. (2025, January 28). Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tahun 2025 dan dampaknya terhadap masyarakat serta perekonomian nasional. *Kompasiana*. https://www.kompasiana.com/novilinda8665/6901879eed6415706d301112/kebijakan-penyesuaian-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-di-indonesia-tahun-2025-dan-dampaknya-terhadap-masyarakat-serta-perekonomian-nasional

Nabila, G. P. (2023). Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap anggaran keluarga di Batang. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2*(2), 393–401.

Nugroho, R. (2018). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Elex Media Komputindo.

Nurfalah, I. (2024). Oil price volatility, macroeconomic performance, and investment responses: Evidence from Indonesia. *International Energy Market Journal, 1*(1), 12–29.

Pratiwi, E. N. (2022). Analisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). *Journal Economics and Strategy, 3*(2). https://doi.org/10.36490/jes.v3i2.429

Putri, H., Noviyanti, F., Ramadhani, N., Rifki, A., Iskandar, R., Tamba, E. D., & Fajar, C. P. N. (2025). Dampak kenaikan harga BBM terhadap biaya operasional UMKM: Studi kasus Mendalo Darat. *Journal of Economic Education, 4*(2).

Sarbaini, S., & Nazaruddin, N. (2022). Pengaruh kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan, 2*(1). https://doi.org/10.55826/tmit.v1iII.27

Soesanto, E., Komansilan, T., & Salsabillah, N. (2024). Dinamika harga BBM: Dampaknya terhadap ekonomi nasional dan daya beli masyarakat. *Jupiter: Publikasi Ilmu Keteknikan Industri, Teknik Elektro dan Informatika, 3*(1). https://doi.org/10.61132/jupiter.v3i1.686

Tamba, A. A., Purba, J. A., Napitu, K. A., & Munthe, R. P. (2025). Kenaikan harga BBM pada tahun 2022 terhadap inflasi yang terjadi di Indonesia. *Jurnal Perubahan Ekonomi, 9*(3), 66–79.

Taufik, T., Yunus, M. K., & Chahyono, C. (2023). Analisis dampak kenaikan harga BBM terhadap perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan belanja. *Indonesian Journal of Business and Management, 6*(1). https://doi.org/10.35965/jbm.v6i1.3793

Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).